BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pemaparan dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Yang Mengalami *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak yakni Ibu yang melakukan penganiayaan dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana, *baby blues syndrome* bukanlah gangguan kesehatan jiwa yang serius sehingga ibu dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut serta mengetahui ketercelaan dari tindakannya. Namun jika kondisi ibu sudah mencapai tingkat *Postpartum Psychosis*, ibu termasuk ke dalam orang dengan gangguan jiwa seperti yang ditekankan pada Pasal 44 KUHP. Jika dihubungkan dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Postpartum Psychosis* dapat menjadi gejala awal terjadinya gangguan mental yang lebih serius seperti bipolar dan skizofrenia yang apabila dampaknya berlangsung dalam jangka panjang maka ibu masuk ke dalam kategori disabilitas mental.
2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Ibu Yang Mengalami *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak yaitu salah satunya pembaharuan mengenai pertanggungjawaban pidana pada Pasal 44 KUHP yaitu berdasarkan keterangan dari seorang ahli kejiwaan atau psikiater yang dibuktikan melalui surat *Visum et Repertum Psychiatricum*

(VeRP) maka hakim dapat memutuskan kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab, pada hal ini hakim dapat meminta supaya orang ini dirawat di rumah sakit jiwa, maksimal satu tahun sebagai waktu percobaan. Selanjutnya diperbaharui didalam KUHP baru pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila pelaku terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka hakim dapat memerintahkan supaya dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Tindakan yang dimaksud sudah ditekankan pada Pasal 103 Ayat (2) KUHP salah satunya rehabilitasi dan perawatan di rumah sakit jiwa hal ini membuktikan bahwa pemerintah lebih berfokus pada penanganan dan penyembuhan kesehatan jiwa pelaku.

B. Saran

1. Bagi Hakim yang memiliki wewenang untuk memutus apakah seorang pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab atau tidak, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana kondisi jiwa ataupun mental seorang ibu ketika menangani kasus ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak agar tidak hanya hak anak yang mendapat perlindungan tetapi juga memperhatikan kesehatan jiwa ibu. Serta diperlukan penyuluhan atau edukasi bagi masyarakat yang masih menganggap bahwa *baby blues syndrome* adalah hal yang wajar dan biasa terjadi untuk lebih memperhatikan sindrom *baby blues* agar

mendapat pengobatan yang tepat sehingga gejala tidak meningkat pada gangguan kesehatan mental yang lebih serius.

2. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP baru yaitu seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya hanya dikenai tindakan yang bertujuan untuk pemulihan dan perawatan kesehatan jiwa pelaku yang singkatnya dapat berupa rehabilitasi atau perawatan di rumah sakit jiwa, dan lain-lain. Jika memungkinkan, tindakan ini sebagai pertimbangan alternatif hukum yang dapat memulihkan kesehatan jiwa ibu dan membantu ibu belajar dari pengalaman tersebut tanpa harus melibatkan pidana yang berat.